BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa peran marga tanah, khususnya marga Lingga, dalam pemilihan calon legislatif tahun 2024 di Desa Onan Lama masih sangat kuat dan menentukan. Dalam konteks sosial-budaya massssyarakat Pakpak, marga berfungsi bukan hanya sebagai simbol identitas genealogis, tetapi juga sebagai struktur kekuasaan sosial yang mengatur hubungan antarindividu, menentukan legitimasi sosial, serta memengaruhi keputusan politik masyarakat. Hubungan kekerabatan yang kuat antaranggota marga membuat masyarakat cenderung memberikan dukungan politik kepada calon legislatif yang berasal dari marga yang sama. Dukungan ini bukan semata-mata karena kesamaan visi atau program kerja, tetapi lebih karena adanya rasa tanggung jawab moral, loyalitas adat, dan solidaritas komunal terhadap kelompok asal. Dalam konteks ini, politik menjadi ekspresi dari identitas budaya, bukan pilihan yang diambil berdasarkan pertimbangan rasional atau kinerja politik calon. Pola semacam ini mencerminkan bahwa praktik politik di Desa Onan Lama masih berlandaskan *politik identitas*, di mana ikatan sosial dan kultural lebih berpengaruh dibandingkan rasionalitas modern yang diidealkan dalam sistem demokrasi. Fenomena tersebut juga memperlihatkan bahwa kekuasaan tradisional masih bekerja efektif di tengah sistem demokrasi

formal. Menurut teori otoritas Max Weber, bentuk kekuasaan ini tergolong dalam *otoritas tradisional*, yaitu kekuasaan yang memperoleh legitimasi dari keyakinan masyarakat terhadap adat dan tradisi yang diwariskan turun-temurun. Dalam hal ini, marga Lingga mendapatkan legitimasi bukan dari mekanisme demokrasi atau hukum positif, melainkan dari pengakuan sosial sebagai pemegang otoritas adat dan penjaga nilai-nilai leluhur. Dengan demikian, kekuasaan marga tanah tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga nyata dalam memengaruhi arah politik dan pengambilan keputusan masyarakat.

2. Dominasi marga tanah dalam arena politik di Desa Onan Lama menimbulkan berbagai tantangan serius terhadap praktik demokrasi dan kebebasan politik masyarakat. Struktur sosial yang masih bertumpu pada sistem kekerabatan adat menjadikan marga Lingga memiliki otoritas besar dalam menentukan arah politik masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Temuan lapangan memperlihatkan bahwa tekanan sosial dan moral sering kali digunakan sebagai alat kontrol politik. Masyarakat yang tidak mengikuti keputusan marga kerap mengalami bentuk eksklusi sosial, seperti tidak dilibatkan dalam kegiatan adat, kehilangan dukungan sosial, bahkan dianggap melanggar nilai persaudaraan. Kondisi ini menyebabkan masyarakat berada dalam posisi yang dilematis: di satu sisi mereka ingin mempertahankan kebebasan politik, namun di sisi lain takut kehilangan status sosial dan pengakuan dalam komunitas adatnya. Akibatnya, partisipasi politik

menjadi bersifat semu, di mana masyarakat "memilih" bukan karena kesadaran politik, melainkan karena tekanan moral dan sosial. Dalam perspektif teori Weber, hal ini menunjukkan adanya pergeseran dari *otoritas tradisional* menuju bentuk *kekuasaan koersif*, di mana legitimasi adat digunakan untuk memaksakan kepatuhan politik. Pola kekuasaan seperti ini semakin mendekati karakteristik *patrimonialisme*, yaitu sistem di mana pemimpin adat atau marga dominan menguasai seluruh aspek kehidupan masyarakat baik sosial, budaya, maupun politik dan masyarakat hanya berperan sebagai pengikut pasif. Selain itu, dalam konteks teori politik identitas, dominasi marga tanah di Desa Onan Lama memperlihatkan bagaimana identitas genealogis dapat dijadikan alat mobilisasi politik. Identitas marga Lingga dianggap sebagai simbol "keaslian" dan "pemilik sah" tanah ulayat, sehingga calon legislatif yang berasal dari marga ini memperoleh legitimasi simbolik yang kuat. Sebaliknya, calon dari luar marga Lingga sering kali sulit menembus struktur sosial tersebut karena dianggap tidak memiliki ikatan emosional dan genealogis dengan masyarakat. Akibatnya, kontestasi politik menjadi tertutup, tidak kompetitif, dan berorientasi pada kesetiaan kelompok, bukan pada visi dan kompetensi kandidat.

5.2 Saran

1. Pendidikan politik perlu diarahkan agar masyarakat memahami bahwa menghormati adat dan menjunjung tinggi nilai-nilai marga tidak berarti harus mengorbankan kebebasan politik individu. Pemerintah desa

bersama lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, dan pemangku adat perlu berkolaborasi membentuk forum dialog sosial yang mendorong refleksi kritis mengenai makna partisipasi politik dan hak-hak warga negara. Melalui pendidikan semacam ini, diharapkan masyarakat dapat membedakan antara loyalitas adat dan pilihan politik pribadi, serta mampu berpartisipasi secara bebas dan rasional dalam pemilu tanpa tekanan moral. Selain itu, tokoh-tokoh marga juga diharapkan dapat memainkan peran sebagai pengayom yang netral dalam ranah politik. Marga tanah hendaknya tidak menjadi alat politik praktis, melainkan tetap berfungsi sebagai penjaga moralitas, nilai persaudaraan, dan keharmonisan sosial desa. Penguatan nilai-nilai budaya yang positif seperti *persadaan* (persaudaraan), pengayoman, dan keadilan sosial dalam adat Pakpak perlu dipertahankan untuk memperkuat moralitas politik masyarakat tanpa menciptakan dominasi.

2. Pemerintah daerah Kabupaten Dairi perlu merumuskan kebijakan yang secara eksplisit mengatur batas antara ranah adat dan ranah politik. Otoritas adat hendaknya tetap dihormati dalam konteks budaya, namun tidak boleh mengintervensi hak politik individu. Regulasi sosial dan tata pemerintahan yang jelas akan membantu menjaga keseimbangan antara penghormatan terhadap adat dan perlindungan hak-hak politik warga. Selain itu, perlu dikembangkan mekanisme pengawasan dan dialog antara lembaga adat dan lembaga pemerintahan desa agar keduanya dapat berjalan secara paralel dan saling melengkapi. Tokoh adat

diharapkan menjadi mitra strategis pemerintah desa dalam membina masyarakat, bukan menjadi pihak yang mendominasi keputusan politik. Di sisi lain, lembaga pemerintahan juga harus meningkatkan kapasitas dan independensinya agar tidak mudah terpengaruh oleh tekanan sosial dari kelompok marga dominan. Lebih jauh, upaya pemberdayaan masyarakat harus difokuskan pada peningkatan kesadaran politik dan kemandirian berpikir. Program pelatihan kepemimpinan desa, sekolah politik masyarakat, serta kampanye kesetaraan politik dapat menjadi sarana efektif untuk memperkuat posisi masyarakat dalam menghadapi tekanan sosial. Masyarakat perlu diberdayakan agar mampu menggunakan hak pilihnya secara bebas, tanpa rasa takut atau ketergantungan pada otoritas adat.

UNIMED
THE Character Building UNIVERSITY